

Strategi Memangkas Birokrasi (*Banishing Bureaucracy*) yang Inovatif dan Kolaboratif Menuju Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Kubu Raya

An Innovative and Collaborative Strategy for Banishing Bureaucracy to Accelerate Stunting Reduction in Kubu Raya Regency

Zulkarnaen¹, Rita Ria Messy²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

²Lembaga Kebijakan dan Dinamika Pembangunan, Pontianak

Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124, Indonesia

Email: zulkarnaen@fisip.untan.ac.id

Tanggal submit: 6 November 2024; Tanggal penerimaan: 1 Juli 2025

ABSTRAK

Tingginya prevalensi balita stunting di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2022 yang mencapai 40,3% ditanggapi dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2019 tentang Gerakan Percepatan Penurunan Angka Stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi inovatif dan kolaboratif dalam memangkas birokrasi untuk percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan fokus pada analisis strategi inti, konsekuensi, pelanggan, pengendalian, dan budaya dalam implementasi kebijakan yang inovatif. Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kubu Raya mencakup pembentukan kelembagaan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan, pembentukan tim pendamping keluarga, serta Poskentrin (Pos Kesehatan Pesantren). Pendanaan program tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga melibatkan dana desa, dana CSR, dan kontribusi sektor swasta. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengimplementasikan aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) untuk memonitor perkembangan stunting secara lebih efektif. Inovasi pelayanan seperti "SALJU" (Selasa Jumat Terpadu) dan program "Kepung Bakul" turut melibatkan kolaborasi antara masyarakat dan sektor swasta. Di Puskesmas Sungai Raya, inovasi dengan sebutan "Kepiting" (Kenali Peduli Stunting) dilaksanakan, sementara remaja dilibatkan dalam gerakan "Graceting" (Gerakan Remaja Cegah Stunting) yang diprakarsai oleh PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja). Semua inisiatif ini merupakan bagian dari kebijakan kolaboratif dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Kubu Raya.

Kata Kunci: *strategi; memangkas birokrasi; stunting; inovasi; kolaborasi*

ABSTRACT

The high prevalence of stunting among children under five in Kubu Raya Regency, reaching 40.3% in 2022, was addressed through the issuance of Regent Regulation No. 59 of 2019 concerning the Acceleration Movement for Stunting Reduction. This study aims to analyze the innovative and collaborative strategies implemented to streamline bureaucracy for the accelerated reduction of stunting in Kubu Raya Regency. The research method used is descriptive qualitative, focusing on the analysis of core strategies, consequences, stakeholders, control, and culture in the implementation of innovative policies. Efforts to accelerate stunting reduction in Kubu Raya include the establishment of institutional teams for stunting reduction at the sub-district level, the formation of family assistance teams, and the creation of Poskentrin (Pos Kesehatan Pesantren, or Islamic boarding school health posts). Funding for the program comes not only from the regional budget (APBD) but also from Village Funds, CSR (Corporate Social Responsibility) funds, and private sector contributions. In addition, the Kubu Raya Regency Government has implemented an electronic-based community nutrition recording and reporting application (e-PPGBM) to more effectively monitor stunting development. Service innovations such as "SALJU" (Integrated Tuesday Friday Services) and the "Kepung Bakul" program involve collaboration between the community and the private sector. At the Sungai Raya Health Center, an innovation called "Kepiting" (Know and Care for Stunting) is being implemented, while youth are engaged in the "Graceting" (Youth Movement to Prevent Stunting), initiated by PIK-R (Youth Information and Counseling Center). All these initiatives are part of a collaborative policy approach to reducing stunting in Kubu Raya Regency.

Keywords: *strategy; banishing bureaucracy; stunting; innovation; collaboration*

PENDAHULUAN

Tingkat malnutrisi yang dialami bayi serta balita di Indonesia pada saat ini cukup memprihatinkan. Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, sekitar 21,6 persen anak mengalami stunting.⁽¹⁾ Stunting adalah kondisi di mana anak balita mengalami kekurangan gizi dalam periode yang lama, yang mengakibatkan gangguan pada pertumbuhannya dan membuat tinggi badan mereka lebih rendah dibandingkan dengan standar yang sesuai untuk usia mereka.⁽²⁾ Hal ini dapat terjadi akibat dari kurang gizi yang dialami sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun, dan akan berdampak pada kecerdasan, produktivitas dan kesehatan di masa depan.

Pencegahan stunting penting untuk difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) mencakup 270 hari masa kehamilan ditambah 730 hari (2 tahun) pertama setelah kelahiran anak.⁽³⁾ Tahap ini merupakan masa penting dan berharga dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, yang berpotensi memengaruhi kualitas hidupnya di masa dewasa.⁽⁴⁾ Penelitian dan data internasional, termasuk yang disajikan dalam laporan *World Bank Investing in Early Years Brief 2016*, mengungkapkan bahwa stunting pada anak tidak hanya mempengaruhi kesehatan mereka, tetapi juga dapat menghambat perkembangan ekonomi dan menurunkan produktivitas tenaga kerja.⁽⁵⁾

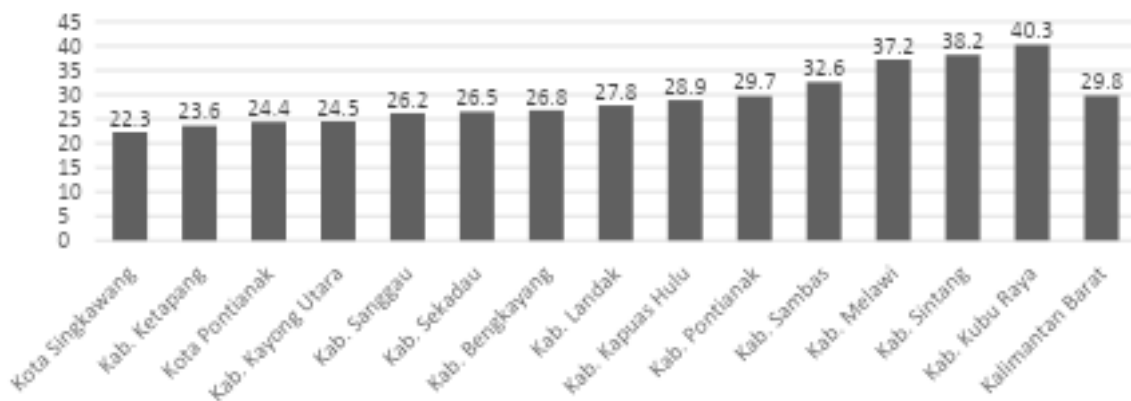
Diperkirakan bahwa stunting dapat mengurangi hingga 11% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menurunkan pendapatan pekerja dewasa sebanyak 20%.⁽⁶⁾ Selain itu, stunting memperburuk ketimpangan sosial, dengan potensi penurunan pendapatan seumur hidup sebesar 10%, yang dapat memicu kemiskinan lintas generasi dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan memicu kemiskinan yang berlanjut antar-generasi.⁽⁷⁾ Meskipun berbagai program kesehatan telah diterapkan

selama bertahun-tahun, prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi. Padahal target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu sebesar 20%.⁽⁸⁾ Pada tanggal 5 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Peraturan itu Presiden RI menetapkan target penurunan hingga 14 persen pada tahun 2024.⁽⁹⁾

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 telah merilis data jumlah prevalensi stunting pada balita di Indonesia mencapai angka 24,4 persen, sedangkan untuk Kalimantan Barat termasuk dalam jumlah prevalensi stunting yang tinggi menempati urutan ke 7 tertinggi setelah NTT, Sulawesi Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan NTB yaitu mencapai 29,8 persen.⁽¹⁰⁾

Di Kalimantan Barat, prevalensi stunting di tahun 2020 mencapai angka 29,8 persen, menjadikannya salah satu daerah dengan angka tertinggi di Indonesia. Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat mencatat angka prevalensi stunting balita tertinggi di wilayah tersebut, mencapai 40,3 persen. Angka ini jelas jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Sintang yang memiliki prevalensi 38,2 persen dan Kabupaten Melawi dengan 37,2 persen. Tingginya angka stunting di Kubu Raya juga mencolok jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang tercatat sebesar 24,4 persen.⁽¹¹⁾ Sebagai respon terhadap masalah ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 59 Tahun 2019 yang mengatur Gerakan Percepatan Penurunan Stunting. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi prevalensi stunting melalui peningkatan kualitas gizi individu, keluarga, dan masyarakat.⁽¹²⁾

Gambar 1. Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022



Sumber : SSGI, 2021⁽¹⁰⁾

Langkah-langkah yang diambil mencakup perbaikan pola konsumsi makanan, peningkatan kesadaran gizi, akses yang lebih baik terhadap pelayanan gizi, serta berfokus pada penguatan sistem pemantauan pangan dan gizi. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk meningkatkan status gizi masyarakat serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kubu Raya. Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Prevalensi stunting di Kubu Raya meningkat dari 19,1 persen pada tahun 2015 menjadi 29,3 persen pada tahun 2016, dan mencapai 34,8 persen pada tahun 2017. Pemantauan lebih lanjut pada tingkat kecamatan mencatat angka stunting sebesar 30,6 persen pada tahun 2017, meskipun terdapat penurunan menjadi 25,6 persen pada tahun 2018, angka tersebut tetap mengkhawatirkan.⁽¹¹⁾

Stunting pada anak disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya kurangnya asupan gizi dan kondisi kesehatan yang kurang baik. Untuk menurunkan prevalensi stunting, penting untuk menangani permasalahan gizi tersebut, termasuk ketersediaan pangan, serta akses terhadap makanan yang bergizi, praktik pemberian makanan yang baik, akses layanan kesehatan, serta kondisi sanitasi dan air

bersih. Intervensi yang tepat pada keempat faktor ini diharapkan dapat mengurangi berbagai masalah gizi pada anak, baik yang berkaitan dengan kekurangan maupun kelebihan gizi.⁽¹³⁾

Berbagai penelitian mengenai penanggulangan stunting telah dilakukan. Hasil-hasil penelitian tersebut mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam upaya penanganan stunting meliputi adanya keterbatasan sumber daya seperti manusia dan pendanaan yang memadai untuk program penanganan stunting.⁽¹⁴⁾ kurangnya kesadaran dan pengetahuan penduduk mengenai pentingnya asupan gizi yang seimbang.⁽¹⁵⁾

Instansi terkait perlu memainkan peran penting sebagai sektor utama dan penanggung jawab dalam aksi konvergensi stunting. Selain itu, perhatian yang teliti terhadap peningkatan kualitas data stunting serta penyediaan pendanaan yang memadai menjadi faktor krusial. Komitmen yang kuat dari Puskesmas, terutama dalam mendukung kesehatan ibu melalui program kelas ibu hamil, bayi, dan balita, juga dapat memberikan dampak positif.⁽¹⁶⁾ Lebih lanjut, pelaksanaan tugas yang efektif oleh para pelaksana dalam program-program spesifik dan sensitif, serta pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan hasil

program, dapat mempengaruhi penurunan prevalensi stunting.

Merujuk pada pentingnya peranan birokrasi dalam penanganan stunting maka diperlukan adanya strategi dalam pelaksanaan kebijakan agar lebih efektif sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi memangkas birokrasi (*banishing bureaucracy*) yang inovatif dan kolaboratif dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Kubu Raya. Diharapkan temuan penelitian ini dapat berkontribusi berupa ide dan pemikiran yang bermanfaat strategis kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kubu Raya, guna mendukung upaya percepatan penurunan stunting secara efektif.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:16) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang melihat realitas sosial dipandang sebagai hal yang terus berkembang dan penuh makna. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek yang terjadi secara alami maka tidak dapat dimanipulasi.⁽¹⁷⁾ Perolehan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada subjek penelitian, observasi atau pengamatan (*observation*), dokumentasi dan dengan melakukan *focus group discussion* (FGD) bersama pihak yang terkait penanganan stunting di Kabupaten Kubu Raya. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan mengacu berdasarkan 5 (lima) indikator *Banishing Bureaucracy* (18) yang digunakan yaitu strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol/pengendalian dan strategi budaya.⁽¹⁸⁾ Adapun informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini pihak yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Kubu Raya yaitu 2 (dua) orang Kasi Kesehatan Gizi Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten

Kubu Raya, Camat Sungai Ambawang, Sekretaris Camat Rasau Jaya, Kepala Desa Teluk Bakung, Kepala Puskesmas Lingga, dan Bidan Desa Teluk Bakung (Tim TPPS). Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2018:288) *purposive* adalah teknik penentuan informan dengan tujuan atau pertimbangan tertentu untuk memperoleh informasi.⁽¹⁹⁾ Analisis data dilakukan dengan menggunakan model yang disampaikan Miles dan Huberman (2005:16-19) yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.⁽²⁰⁾ Untuk keabsahan data dilakukan uji keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah triangulasi yaitu melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Langkah ini memastikan bahwa data yang sudah dikumpulkan mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan konsep *Banishing Bureaucracy* (Memangkas Birokrasi). Strategi ini adalah bagian dari penerapan konsep *reinventing government* mengacu pada perubahan mendalam dalam organisasi dan sistem kerja lembaga publik untuk mendorong kemajuan. Menurut Osborne dan Gaebler (1997), konsep *Banishing Bureaucracy* bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, adaptabilitas, serta kemampuan untuk berinovasi dalam sektor publik.⁽²¹⁾ Variabel penelitian mengenai *Banishing Bureaucracy* diukur dengan menggunakan lima indikator, yaitu: Strategi inti (*centre strategy*), Strategi konsekuensi (*consequence strategy*), Strategi pelanggan (*customer strategy*), dan Strategi budaya (*cultural strategy*), yang diterapkan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

STRATEGI INTI (*THE CORE STRATEGY*)

Visi dan misi percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Kubu Raya (KKR) diselaraskan dengan visi dan misi pemerintah pusat sebagaimana merujuk pada

Peraturan Bupati Kubu Raya No. 59 Tahun 2019 memiliki tujuan utama untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas, yang mencakup kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas, melalui optimalisasi status gizi. Upaya peningkatan gizi dilakukan secara berkesinambungan dengan fokus utama menurunkan angka stunting serta mewujudkan "Zero Stunting" di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Langkah-langkah yang diambil dalam mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut mencakup implementasi delapan aksi konvergensi penurunan stunting di wilayah Kecamatan Ambawang, yang angka stuntingnya masih tinggi. Delapan langkah aksi dalam program ini meliputi: Langkah 1. Analisis Situasi, Langkah 2. Penyusunan Rencana Kegiatan, Langkah 3. Forum Diskusi Stunting, Langkah 4. Peraturan Bupati/Walikota mengenai Peran Desa, Langkah 5. Pelatihan Kader Pembangunan Manusia, Langkah 6. Sistem Manajemen Data Stunting, Langkah 7. Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, Langkah 8. Evaluasi Kinerja Tahunan. ⁽²²⁾

Saat ini strategi yang diterapkan di Kecamatan Sungai Ambawang untuk mendukung delapan aksi konvergensi penurunan stunting meliputi: 1. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang melibatkan berbagai pihak seperti petugas kesehatan, bidan, tokoh masyarakat, Satpol PP, dan tokoh agama. Mereka menjalankan strategi "Kepung Bakul" yang menekankan kerja sama untuk menurunkan angka stunting. 2. Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK), 3. Pembagian makanan tambahan (telur, ikan, susu, roti, kacang hijau) melalui posyandu balita setiap bulan dan langsung ke rumah keluarga dengan anak stunting, 4. Pelaksanaan program posyandu untuk memantau kesehatan anak dengan pengukuran tinggi, berat, lingkar pinggang, dan lingkar kepala, yang penting untuk deteksi stunting, 5. Program puskesmas yang mencakup penyuluhan KB, pembagian tablet tambah darah, dan edukasi tentang penyajian

makanan sehat untuk anak, 6. Bantuan obat dan makanan selama 90 hari pertama kehidupan bayi yang dijalankan di Puskesmas Lingga dengan dana sebesar Rp. 400 juta, 7. Pembentukan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini guna mencegah stunting.

Dari hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kubu Raya, target penurunan stunting di KKR hingga 2023 adalah mencapai angka 5%. Namun, hingga akhir desember 2023, angka stunting masih berada di 6,83%. Target penurunan sebesar 2% diharapkan tercapai dengan pengawasan dan pelaksanaan program secara optimal. Di Kecamatan Rasau Jaya, penanganan stunting dilakukan oleh TPPS Kecamatan berdasarkan SK Bupati Kubu Raya No. 525 Tahun 2022, yang melibatkan lintas sektor di tingkat kecamatan. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilakukan sesuai dengan SOP dari pemerintah pusat, namun disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing wilayah.

Pendanaan program berasal dari beberapa sumber, termasuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui dana desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dinas Kesehatan, serta CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan di wilayah Sungai Ambawang. Meskipun dana dinilai cukup, distribusi ke daerah-daerah terpencil, seperti Teluk Bakong, masih kurang merata dan diatasi dengan pengajuan proposal kepada CSR. Target nasional penurunan stunting adalah di bawah 14%, sedangkan di wilayah Puskesmas Lingga, angka stunting masih berada di 15,2%. Dengan sisa waktu yang ada, upaya terus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

STRATEGI KOSENKUENSI (THE CONSEQUENCES STRATEGY)

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak menerapkan sanksi khusus terhadap wilayah yang memiliki angka stunting tinggi, melainkan hanya memberikan teguran

kepada pihak-pihak terkait, seperti Kepala Puskesmas, Kepala Desa, dan Camat, melalui rapat koordinasi. Teguran tersebut bertujuan untuk meningkatkan perhatian terhadap penanganan stunting di wilayah mereka. Setelah teguran disampaikan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi adanya kesalahan atau ketidaktepatan dalam penanganan stunting. Salah satu contoh kasus terjadi pada tahun 2022 di Puskesmas Lingga, ketika kesalahan dalam pencatatan dan penginputan data mengakibatkan tingginya angka stunting akibat adanya data ganda. Atas insiden tersebut, Kepala Puskesmas Lingga mendapat teguran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

Di sisi lain, Pemerintah memberikan apresiasi kepada wilayah yang berhasil menurunkan angka stunting, seperti Kabupaten Kubu Raya yang menerima penghargaan dari BKKBN pada Mei 2023 atas penurunan stunting pada tahun 2022.⁽²³⁾ Untuk mencapai target penurunan hingga 5%, Dinas Kesehatan perlu mempertimbangkan pemberian penghargaan khusus kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) agar memotivasi kerja mereka. Namun, hingga kini belum ada penghargaan khusus untuk individu atau tim di tingkat kecamatan, menunjukkan perlunya peningkatan apresiasi bagi pelaksana di lapangan yang berkontribusi dalam penurunan stunting..

Namun, masih terdapat kekurangan dalam pembinaan, terutama terkait pemahaman SOP, yang sering kali hanya diketahui oleh ketua pelaksana, sehingga anggota lain, terutama non-tenaga kesehatan, kurang memahami. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan frekuensi pelatihan bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk meningkatkan kemandirian dalam mendampingi keluarga dengan anak stunting.

Di Kecamatan Rasau Jaya, upaya percepatan penurunan stunting diharapkan mendukung visi Bupati Kubu Raya untuk mencapai "*Zero Stunting*" pada tahun 2024.

Meskipun sarana dan fasilitas umum memadai, masih diperlukan peningkatan unit untuk mencakup enam desa di Kecamatan Rasau Jaya. Hingga kini, belum ada penghargaan atau insentif khusus untuk TPPS, meskipun Bupati Kubu Raya dan Camat Rasau Jaya terus memberikan dukungan moral dan motivasi kepada seluruh kader lintas sektor dalam upaya penurunan stunting.

STRATEGI PELANGGAN (THE CUSTOMERS STRATEGY)

Beberapa elemen penting dalam upaya penurunan stunting mencakup peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, evaluasi kepuasan terkait layanan penanganan stunting masih digabungkan dengan survei pelayanan kesehatan umum yang dilakukan setiap enam bulan. Penilaian ini mencakup kotak saran yang tersedia di setiap Puskesmas serta survei lapangan yang dikoordinasikan oleh Camat Sungai Ambawang. Keterbukaan informasi mengenai stunting menjadi komponen krusial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya stunting, sehingga program penyuluhan atau sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan lintas sektor, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA), berfokus pada edukasi masyarakat, seperti calon pengantin, untuk mencegah risiko stunting.

Camat Rasau Jaya mengungkapkan bahwa sosialisasi tentang stunting mendapatkan respons yang baik dari masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa keluarga yang enggan terbuka karena merasa malu jika anak mereka terdiagnosis stunting, sehingga menghambat percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, strategi proaktif melalui pendekatan "jemput bola" perlu dioptimalkan oleh TPPS. Dukungan TPPS, terutama dalam pemantauan kesehatan rutin, sangat membantu keluarga yang anaknya mengalami stunting. Kepala Puskesmas secara aktif berinteraksi langsung dengan

keluarga untuk memantau perbaikan kondisi anak setelah intervensi. Pendekatan personal semacam ini membuat masyarakat lebih nyaman dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penanganan stunting secara tepat.

Transparansi dalam proses penanganan stunting perlu terus dipertahankan, sesuai dengan prinsip "*Kepung Bakul*" yang menekankan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya diharapkan melakukan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan stunting, khususnya di Puskesmas, guna mengidentifikasi dan menanggapi keluhan masyarakat. Meski pengukuran khusus terkait layanan stunting belum dilaksanakan, program inovatif seperti "SALJU (Selasa Jumat Terpadu)" yang menawarkan pendekatan jemput bola diharapkan dapat memperkuat efektivitas penanganan stunting apabila diimplementasikan secara menyeluruh di semua desa.

STRATEGI PENGENDALIAN (THE CONTROL STRATEGY)

Hasil wawancara penelitian menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting di Kecamatan Rasau Jaya dilakukan melalui mekanisme Lokakarya Mini (LOKMIN) yang diadakan setiap tiga bulan. Menurut Sekretaris Camat Tumijan, LOKMIN berfungsi sebagai rapat koordinasi antar lembaga dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dai berbagai sektor di tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Pada pertemuan tersebut, setiap sektor melaporkan perkembangan data, diikuti identifikasi masalah dan solusi yang diperlukan. Pengawasan program tidak hanya berbasis laporan tertulis, tetapi juga dilakukan melalui kunjungan lapangan untuk memverifikasi implementasi program.

Kepala Bagian Gizi Masyarakat, Sri Wahyuni, menambahkan bahwa pengendalian stunting juga dilakukan melalui intervensi langsung kepada masyarakat dan koordinasi rutin dengan Bappeda setiap tiga

bulan. LOKMIN melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, puskesmas, dan pemerintah desa, untuk mengevaluasi kemajuan program dan membahas kendala yang dihadapi, dan hasil rapat disampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan. Penanganan stunting di Kubu Raya menekankan kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketahanan Pangan, sejalan dengan delapan Aksi Konvergensi dalam RPJMN 2020-2024.⁽²⁴⁾ Aksi ini mencakup analisis situasi, perencanaan, rembuk stunting, pembinaan kader, hingga publikasi data. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019, berkomitmen mencapai visi "*Zero Stunting*" pada 2024, dan data menunjukkan prevalensi stunting di Kubu Raya terus menurun dalam lima tahun terakhir. Seperti yang dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Prevalensi Stunting di Kabupaten Kubu Raya

No	Tahun	Persentase Prevalensi Stunting
1	2019	23,6%
2	2020	13,4%
3	2021	7,9%
4	2022	6,83%
5	2023	6.8 %

Sumber :e-PPGBM

Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Kubu Raya menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 5%, sementara saat ini prevalensi stunting masih mencapai 6,8%. Kecamatan Lingga menjadi salah satu wilayah dengan kasus stunting tinggi, di mana sekitar 42 anak terdeteksi mengalami stunting. Pengelolaan data yang akurat sangat penting dalam penanganan stunting, mengingat kesalahan pencatatan data melalui aplikasi e-PPGBM pernah menyebabkan peningkatan jumlah kasus yang tidak akurat. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan, Puskesmas, dan Dinkes sebagai alat pemantauan stunting.

Program "Selasa Jumat Terpadu" (SALJU) menerapkan pendekatan door-to-door untuk deteksi dini stunting dan pemantauan asupan gizi serta kondisi ibu hamil, serta membantu memperbarui data stunting yang dilaporkan melalui e-PPGBM. Tantangan geografis yang beragam di Kabupaten Kubu Raya mendorong penerapan *e-government* untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral. Pemantauan penanganan stunting dilakukan melalui berbagai forum, seperti Musrenbang dan rapat koordinasi di Puskesmas setiap tiga bulan, yang melibatkan pemerintah kecamatan, desa, kader PKK, dan masyarakat. Strategi ini sejalan dengan pendekatan "*Kepung Bakul*" yang menekankan kolaborasi antar elemen.

Monitoring internal dan eksternal dilakukan setiap minggu untuk memastikan program berjalan dengan baik. DP3KB dan TPPS memantau wilayah dengan prevalensi stunting tinggi serta melakukan intervensi langsung ke rumah anak-anak terdampak. Kerja sama lintas sektor dengan dinas terkait seperti pendidikan dan ketahanan pangan sangat penting. Namun, beberapa hambatan dalam penurunan stunting di Kubu Raya mencakup peningkatan pernikahan dini, penyalahgunaan bantuan makanan tambahan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting, serta pengaruh lingkungan dan ekonomi. Mitos terkait kesehatan, seperti anggapan bahwa pengukuran lingkaran pinggang dan kepala pada bayi tidak diperbolehkan, juga menjadi tantangan. Untuk mengatasi hambatan ini, upaya kolaboratif terus dilakukan melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, Puskesmas, dan pihak swasta.

STRATEGI BUDAYA (THE CULTURE STRATEGY)

Percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Kubu Raya, tepatnya di Kecamatan Rasau Jaya, dilaksanakan melalui pendekatan budaya oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan. Camat Rasau Jaya

mengungkapkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan, pendekatan budaya lokal seperti Musyawarah dan Kekeluargaan diterapkan pada setiap rapat dan pelaksanaan program. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif di Rasau Jaya serta memperkuat sinergi antar sektor melalui program "*Kepung Bakul*."

Walaupun tidak terdapat ketentuan formal mengenai budaya organisasi, pelayanan lintas sektor harus berorientasi pada penanganan yang tepat, cepat, akuntabel, dan berbasis data. Di Puskesmas Lingga, yang memiliki prevalensi stunting tinggi, Kepala Puskesmas menerapkan strategi pelayanan dengan mendekati masyarakat melalui kegiatan budaya dan keagamaan. Ia juga bekerja sama dengan tokoh agama untuk menyampaikan penyuluhan tentang stunting kepada masyarakat. Sikap ramah dan keterbukaan dalam komunikasi menjadi prioritas, agar masyarakat merasa nyaman untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Strategi berbasis budaya memegang peranan penting dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Kubu Raya. Program "*Kepung Bakul*," yang diadaptasi dari budaya masyarakat Kalimantan Barat, menekankan gotong royong dan kekeluargaan, melibatkan berbagai sektor, termasuk swasta. Dinas Kesehatan Kubu Raya perlu mengatasi budaya birokrasi yang cenderung mengalihkan tanggung jawab kepada dinas lain, mengingat mereka sebagai sektor utama dalam penanganan stunting. Upaya ini diperlukan untuk meningkatkan kerjasama antar dinas sesuai dengan bidang masing-masing, memperkuat budaya organisasi, mendorong inovasi, serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program stunting. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan percepatan penanganan angka stunting di Kabupaten Kubu Raya dapat lebih efektif.

Inovasi dan Kolaborasi Menuju Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Kubu Raya

Inovasi

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan kemajuan melalui program inovatif seperti "SALJU" (Selasa Jumat Terpadu), yang menyediakan pelayanan kesehatan *door-to-door* pada hari Selasa dan Jumat. Program ini bertujuan mempermudah deteksi dini risiko stunting pada anak, namun masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas, kuantitas, dan akses di beberapa desa, seperti di Kecamatan Sungai Ambawang yang sulit dijangkau dari Puskesmas. Selain itu, program "GRACETING" (Gerakan Remaja Cegah Stunting) melibatkan remaja untuk meningkatkan kesadaran akan gizi dan kesehatan, sedangkan program "KEPITING" (Kenali Peduli Stunting) di Puskesmas Sungai Raya Dalam meliputi pendataan anak stunting, pemeriksaan kesehatan, pemantauan status gizi, dan penanganan lanjutan.

Selain diperlukan inovasi, dalam penanganan stunting masih diperlukan dukungan pendanaan, fasilitas dan infrastruktur, serta sumber daya manusia yang kompeten. Distribusi program harus merata di seluruh Kubu Raya, terutama di desa-desa dengan risiko stunting tinggi. Hambatan implementasi sering terjadi karena kurangnya kontrol di tingkat desa, meskipun program sudah diinformasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya. Intervensi penting telah dilakukan untuk anak di bawah dua tahun, masa kritis gizi, termasuk pembagian tablet tambah darah, pemeriksaan hemoglobin, dan pemberian makanan tambahan.

Penurunan stunting merupakan usaha kesehatan yang meliputi promotif (promosi kesehatan seperti sosialisasi atau penyuluhan), preventif (upaya pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit yang diderita pasien), dan rehabilitasi (pemulihan)

yang disesuaikan dengan karakteristik lokal penduduk. Program "Kepung Bakul" yang dimulai sejak 2019 menunjukkan komitmen Dinas Kesehatan dalam menurunkan stunting, dengan pembentukan tim khusus dan percepatan birokrasi. Penggunaan sistem pencatatan elektronik seperti e-PPGBM mempermudah penginputan data deteksi dini anak stunting. Namun, akses dan fitur dalam sistem ini masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penanganan stunting.

Kolaborasi

Percepatan penurunan stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, karena dampaknya meluas ke bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan. Kerja sama dapat dimulai dari tingkat desa, seperti di Desa Teluk Bakung, Kabupaten Kubu Raya, yang memiliki angka stunting tinggi. Hambatan budaya setempat, seperti penolakan pengukuran lingkaran kepala anak saat posyandu, memerlukan peran tokoh agama dan adat untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan anak. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) harus melibatkan masyarakat dan sektor swasta, dengan sinergi yang transparan dan mekanisme bantuan yang jelas untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi sektor swasta dalam kegiatan CSR, termasuk bantuan dana, pangan, vitamin, dan sanitasi. Semua pihak, termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan TPPS, harus berkontribusi sesuai dengan tugas mereka, terutama dalam menganalisis dan memvalidasi data stunting.

Meskipun ada kemajuan di Kabupaten Kubu Raya, masih diperlukan peningkatan layanan kesehatan dan kolaborasi lintas sektor. Faktor lingkungan seperti sanitasi buruk, kemiskinan, dan pernikahan dini juga menjadi penyebab stunting, sehingga perlu intervensi dari semua sektor sesuai tugas dan fungsi mereka. Strategi "*Kepung Bakul*" di Kecamatan Rasau Jaya, yang mencegah stunting melalui pendataan dan sosialisasi di

berbagai sektor, diharapkan dapat mencapai "zero stunting" pada 2024. Kolaborasi lintas sektor ini mempercepat penanganan melalui pelaporan langsung tanpa birokrasi yang panjang. Pemerintah menargetkan "zero stunting" pada 2024 dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi perangkat daerah. Namun, keterlibatan sektor swasta masih rendah, sehingga diperlukan mekanisme kerja sama yang jelas dan peningkatan kepercayaan untuk mendukung program CSR. Contoh kolaborasi yang berhasil adalah program CSR Pertamina DPPU Supadio di Desa Mekar Sari, yang melibatkan pelatihan kader posyandu dan pemberian makanan tambahan.

Pendekatan multi-sektor sangat penting, termasuk kerjasama antara pemerintah, pendidikan, dan dunia usaha. Namun, penguatan koordinasi internal pemerintah daerah juga diperlukan karena masih ada pihak yang beroperasi tanpa koordinasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) diharapkan aktif dalam rembuk stunting, sementara TPPS harus terus mendapatkan pelatihan agar berfungsi maksimal. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berperan aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan penurunan angka stunting, dengan meningkatkan frekuensi pertemuan untuk berbagi aspirasi dan strategi.

KESIMPULAN

Penerapan Strategi *Banishing Bureaucracy* yang inovatif dan kolaboratif melalui Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan langkah yang positif. Fokus utama strategi ini adalah mencapai tujuan "Zero Stunting" melalui program-program inovatif seperti "SALJU (Selasa Jumat Terpadu)", "GRACETING (Gerakan Remaja Cegah Stunting)", dan "KEPITING (Kenali Peduli Stunting)," yang telah memberikan dampak dalam peningkatan layanan kesehatan dan deteksi dini stunting. Namun, implementasi program ini masih belum

merata di semua desa, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan fasilitas pendukung.

Dalam hal konsekuensi, sanksi yang diterapkan terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ataupun TPPS (Tim Percepatan Penanganan Stunting) di Kabupaten Kubu Raya yang kinerjanya kurang baik diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan kinerja mereka, penghargaan terhadap pihak yang berhasil menurunkan angka stunting di tingkat lokal belum optimal, padahal ini dapat memacu motivasi para pelaksana program. Keterlibatan masyarakat dalam menilai kinerja program juga masih rendah, serta akuntabilitas dari pelaksana program kepada masyarakat belum sepenuhnya terbangun. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sudah rutin, namun kolaborasi lintas sektor perlu ditingkatkan. Budaya kolaborasi seperti konsep "*Kepung Baku!*" sudah mulai diterapkan, tetapi budaya kerja yang inovatif dan proaktif dalam organisasi pemerintah masih perlu diperkuat. Secara keseluruhan, strategi ini berada di jalur yang tepat, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemerataan, akuntabilitas, dan kolaborasi di semua tingkatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta bersedia memberikan informasi dan data terkait kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Kubu Raya yaitu Dinas Kesehatan Kubu Raya, pihak Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Rasau Jaya, Kepala Desa Teluk Bakung, Puskesmas Lingga, serta Tim TPPS Teluk Bakung, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rahman H, Rahmah M, Saribulan N. Upaya Penanganan Stunting Di Indonesia. J Ilmu Pemerintah Suara

- Khatulistiwa. 2023;VIII(01):44–59.
2. Khoiriyah H. Faktor Kejadian Stunting pada Balita. *J Ilmu Kesehat Masy* [Internet]. 2023;1(November 2023):28–40. Available from: <http://journals.stikim.ac.id/index.php/jikm>
 3. Pengabdian J, Masyarakat K, Abdi U, Ungu KE, Puspita L, Umar MY, et al. PENCEGAHAN STUNTING MELALUI 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK). *J Pengabdi Kpd Masy Ungu (ABDI KE UNGU)* [Internet]. 2021;3(1):13–6. Available from: <https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/Abdi>
 4. Wahyuni, Sri Wulandari, Rissa Nuryuniarti AK. Pendidikan kesehatan ibu hamil “1000 hari pertama kehidupan untuk generasi yang lebih baik.” *J ABDIMAS Umtas* [Internet]. 2023;1(1):7–13. Available from: <https://journal.umtas.ac.id/index.php/ABDIMAS/article/view/234/134>
 5. Rebecca, Devercelli AE, Neuman MJ, Wodon Q. Investing in Early Childhood Development. Washington,DC: International Bank for Reconstruction and Development; 2015. 11–13 p.
 6. Suryana EA. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia THE POTENTIAL OF ECONOMIC LOSS DUE TO STUNTING IN THE POTENTIAL OF ECONOMIC LOSS DUE TO STUNTING. 2023;8(1):54.
 7. Kebudayaan JP dan. Pendidikan dan Pembangunan Bangsa Bebas dari Stunting. Kemendikbud [Internet]. 2024;9. Available from: <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/pendidikan-dan-pembangunan-bangsa-bebas-dari-stunting>
 8. Setiyawati ME, Ardhiyanti LP, Hamid EN, Ayu N, Muliarta T, Raihanah YJ, et al. Studi Literatur : Keadaan Dan Penanganan Stunting Di Indonesia. *J Sos dan Hum Univ Persada Indones* [Internet]. 2022;8(2):179–86. Available from: [https://ojs.upi-](https://ojs.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3113)
 9. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Indonesia; 2021.
 10. Kemenko PML. Kejar Target! Per Tahun Prevalensi Stunting Harus Turun 3 Persen [Internet]. 2022. Available from: <https://www2.kemenkopmk.go.id/>
 11. SSGI. Hasil Studi Status Gizi Indonesia / SSGI Kalimantan Barat. 2021.
 12. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Gerakan Percepatan Penurunan Stunting. 2019.
 13. Mardhalena A, Riwayati A, Handayani DN. GERAKAN SADAR STUNTING (GSS): EDUKASI PUBLIK DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING GUNA MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA. 2023;6:2775–81. Available from: [http://jurnal.um-](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/12308/pdf)
 14. Idral SS, Lipoeto NI, Masrul M, Novianti N, Andrafikar A, Umar HB. Factors driving and inhibiting stunting reduction acceleration programs at district level : A qualitative study in West Sumatra. 2023;1–21. Available from: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0283739>
 15. Titin, Wahyuni Sri Eko RGP. Penyuluhan Stunting dan Upaya Pencegahannya Kepada Masyarakat Teluk. *J ABM-Mengabdi*. 2023;11:1–8.
 16. Yunus Pratiwi, Septiyanti R. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STUNTING. *Wind Public Heal J*. 2021;2(5):898–907.
 17. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV ALFABETA; 2018. 16 p.
 18. Osborne, David and Platrik P. Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government. Ney York, USE: Penguin Group; 1997.
 19. Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana

- J. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Tjetjep Rohindi Rohidi, editor. UI-Press; 2005. 16–19 p.
20. Martin B, Rusbiyanti S, Iswati R. BUNISHING BUREAUCRACY SYSTEM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI , KOLUSI , DAN. J STKIP PGRI Jombang [Internet]. 2021;(September):607–20. Available from: <https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/COERCYS/article/download/2062/1682>
 21. Yulliana, Hasanudin B. Kejadian Stunting Berhubungan Dengan 8 Aksi Konvergensi. J Keperawatan Silampari. 2022;6:284–9.
 22. Prokopim Kubu Raya. Prokopim Kubu Raya. 2023. Turunkan Stunting Pemkab Kubu Raya Raih Penghargaan. Available from: <https://prokopim.kuburayakab.go.id/berita/turunkan-stunting-pemkab-kubu-raya-raih-penghargaan-bkkbn>
 23. BKKBN. Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Jakarta: BKKBN; 2021. 6–9 p.